

Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi dalam Rangka Transformasi Digital di KPU

Syanindita Dewi Astri, Dian Widya Putri*

Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syaindita06@gmail.com, dianwidyaPUTRYSY@gmail.com

Abstract. KPU has the responsibility to serve the public, but because there are several indicators of changes in information management that are not good enough to make the Public Relations of the Sumedang KPU make changes to this information dissemination. The method used in this research is a qualitative method. While the research approach that researchers use is a case study approach. In this study the authors conducted research through interviews and this study triangulated the data by interviewing the community to fulfill the research results. The results of this study suggest that changes in the management of information dissemination are through strategic steps designed to deal with digital transformation in Sumedang district by going through the pre-implementation stage where the Public Relations of the Sumedang KPU analyzes the problem, analyzes the audience so that goals are formulated in an effort to disseminate information evenly and transparently with the strategy made by the Public Relations of the Sumedang KPU there are both technical and non-technical obstacles, namely in terms of servers, internet, supporting human resources staffing at the Sumedang KPU and also people who lack literacy in digital media. In the end, in Sumedang KPU disseminated information using the Hybrid method.

Keywords: *Public Communication, Information Dissemination, Digital Transformation.*

Abstrak. KPU memiliki tanggung jawab untuk melayani Masyarakat, karena adanya beberapa indikator dari perubahan pengelolaan informasi yang belum cukup baik yang menjadikan Humas KPU Sumedang melakukan perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penelitian ini melakukan triangulasi data dengan mewawancarai masyarakat untuk memenuhi hasil penelitian Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini melalui Langkah Langkah strategi yang dirancang untuk menghadapi transformasi digital di kabupaten Sumedang ini dengan melalui tahapan pra-pelaksanaan yang dimana Humas KPU Sumedang menganalisis masalah, menganalisis Audiens sehingga dirumuskan tujuan dalam upaya diseminasi informasi secara merata dan transparan dengan strategi yang di buat oleh Humas KPU Sumedang terdapat hambatan baik teknis dan non teknis hambatan hambatan tersebut yaitu dalam segi server, internet, alat penunjang SDM kepegawaian di KPU Sumedang dan juga masyarakat yang minim literasi terhadap media digital, yang pada akhirnya Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi dengan metode Hybrid dikarenakan ketidak sinambungannya antara SDM Masyarakat dengan teknologi yang sudah berkembang yang menjadikan diseminasi informasi online ini tidak berjalan secara optimal maka dari itu Humas KPU membuat strategi baru.

Kata Kunci: *Komunikasi Publik, Diseminasi Informasi, Transformasi Digital.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital pemerintah pada sektor layanan publik bertujuan menyediakan layanan yang lebih efisien, berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan bisa diukur, dimana akhirnya memenuhi ekspektasi serta kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2010, lembaga pemerintahan maupun organisasi publik dituntut untuk mempublikasikan berbagai informasi berbasis website atau digital sebagai bentuk *good governance*.

Seluruh KPU di Provinsi Jawa Barat sudah melakukan deminasi informasi dengan pengaktifan *website* dan media sosial, dan terkhusus KPU Provinsi Jawa Barat itu sendiri juga menggunakan website dan berbagai platform media sosial sebagai sarana dalam penyebaran informasi yang dikhususkan untuk menampung seluruh informasi yang diterima dari KPU masing-masing kota yang ada di Jawa Barat. Sehingga KPU Sumedang juga melakukan aktifasi *website* dan berbagai platform media sosial dalam Upaya melakukan perubahan pengelolaan diseminasi informasi.

Populasi manusia yang rata-rata menggunakan internet dan memiliki media sosial pasti sangatlah mudah untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, dengan kemajuan teknologi adanya perubahan yang dilakukan oleh Humas KPU Sumedang dalam penyebaran informasi sangatlah baik karena dengan modernisasi Humas KPU Sumedang melakukan penyebaran informasi yang dapat dijangkau masyarakat dengan lebih mudah.

Website resmi KPU Sumedang digunakan untuk menyalurkan informasi dengan lebih akurat serta lengkap, website KPU Sumedang memiliki banyak fitur yang dapat mengarahkan ke informasi yang dituju dan dicari oleh masyarakat. Informasi yang secara umum disalurkan oleh KPU RI, akan disalurkan Kembali di *website* KPU Sumedang sehingga penyebaran informasi dapat dijangkau dalam *website* KPU Sumedang tersebut. Didalam *website* KPU Sumedang juga dapat menjangkau akun sosial media KPU Sumedang dalam platform lain, seperti Instagram, X, Facebook dan Youtube. Awamnya masyarakat terhadap teknologi di daerah pedalaman Kabupaten Sumedang menjadikan tantangan bagi Humas KPU tersendiri, untuk mengatasi keterbatasan aktifitas kehumasan di KPU Sumedang, humas KPU Sumedang mengimplementasikan alternatif strategi yang biasa dilakukan dalam kegiatan komunikasi publik dengan masyarakat diantaranya strategi pemanfaatan media konvensional, dan media sosial. Penurunan kepercayaan publik pada hasil pemilu mencerminkan kondisi demokrasi saat ini. Kemajuan teknologi digital, khususnya internet yang berkembang pesat, teknologi penting mendukung prinsip pemilu yang bebas serta adil (LUBER serta JURDIL). KPU sebagai lembaga publik, diharapkan lebih transparan mengelola pemilu.

Didasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka bisa dirumuskan bahwa indentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana langkah-langkah strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan perubahan diseminasi informasi *offline* menjadi *online*, Apa hambatan Humas Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan perubahan diseminasi informasi *offline* menjadi *online* dalam menghadapi transformasi digital, dan Mengapa Humas Komisi Pemilihan Umum melakukan metode *Hybrid* dalam perubahan pengelolaan diseminasi informasi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan perubahan diseminasi informasi *Offline* menjadi *Online*, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat ketika transformasi digital dilakukan dalam melakukan perubahan diseminasi informasi *offline* menjadi *online*, dan untuk mengetahui alasan mengapa Humas Komisi Pemilihan Umum melakukan metode hybrid dalam perubahan diseminasi informasi *online*. Penelitian ini juga memiliki kegunaan teoritis dan praktis.

Komunikasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menyatakan suatu gagasan (isi hati dan pikiran) dan memberikan umpan balik yang berarti menafsirkan pernyataan tentang gagasan orang lain (Lunadi, 2004). Proses komunikasi tentunya mempunyai hambatan Menurut Fajar (2009), terdapat beberapa seperti hambatan pengirim pesan, dalam penyajian atau simbol, hambatan dalam media, hambatan dalam Bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan. Ada beberapa faktor dalam keterampilan diantaranya keterampilan berkomunikasi sikap ungkat pengetahuan, sistem sosial budaya (Amrullah, 2015). Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Menurut Nurdiansyah (2013) bahwa diseminasi informasi, dalam ilmu perpustakaan erat kaitannya dengan istilah publisitas dan promosi. Ada 5 hal yang mempengaruhi proses diseminasi

yaitu source(komunikator).content.pesan). context (konteks), medium (media), dan user (penerima). (Lister et al., 2008) menjelaskan bahwa istilah "media baru" atau "new media" digunakan untuk merujuk pada perkembangan teknologi digital, komputer, dan kemajuan lainnya dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pierre Levy dalam (Solomon, 2018), mengungkapkan bahwa new media adalah sebuah teori yang mengkaji perkembangan media dari bentuk konvensional ke era media digital. Dalam teori media baru ini, Pierre Levy mengemukakan dua pandangan utama yakni pandangan interaksi sosial dan pandangan integrasi sosial.

Menurut Jefkins (2003:9), humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Pelayanan publik juga dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Menurut (Benjamin & Eliot, 1993), Transformasi digital adalah proses sosiokultural dalam mengadaptasi perusahaan dengan bentuk organisasi baru dan keahlian yang dibutuhkan agar tetap dapat bertahan dan relevan dalam lanskap digital. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

B. Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Paradigma penelitian yang dipakai yakni paradigma konstruktif. peneliti memakai metode penelitian kualitatif, dimana alasan pemilihan metode ini yakni peneliti ingin memberikan deskripsi yang jelas terhadap hasil penelitian. Penelitian ini maka peneliti memakai metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yang terpilih pada penelitian ini yaitu beberapa orang yang sudah memenuhi kriteria dan wewenang untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, digunakan berbagai teknik pengumpulan data yang mencakup, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penyajian teknik analisis data, terdapat tiga tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil-hasil penelitian ini maka penulis melakukan triangulasi. Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah-Langkah Strategi Humas KPU dalam Melakukan Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi Offline Menjadi Online.

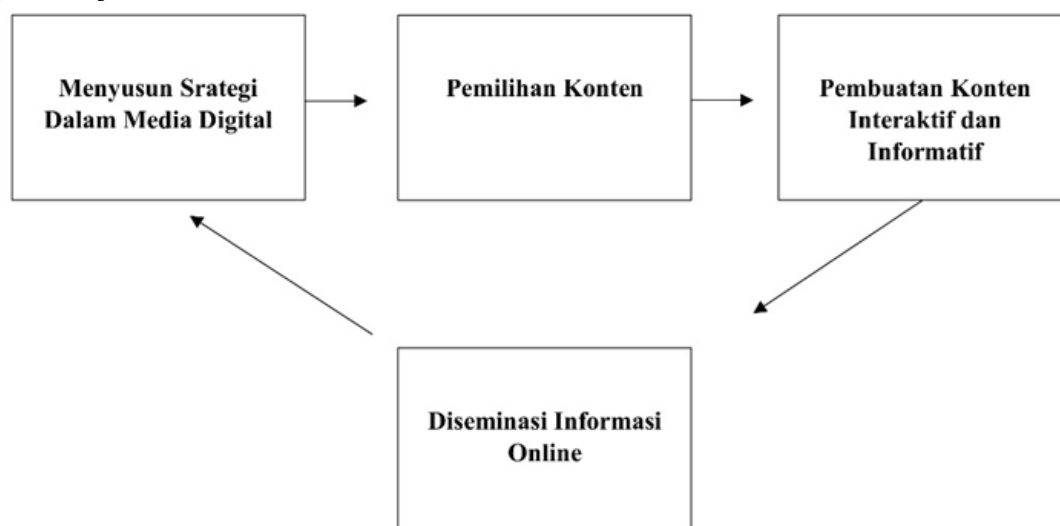
Dalam perkembangan transformasi digital, penggunaan media sosial dan website menjadi salah satu hal yang perlu dikuasai agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Peranan media sosial ini membantu KPU Sumedang memenuhi tupoksi kehumasannya dapat diterapkan dalam pemanfaatan penggunaan dari sosial media itu sendiri. Hasil temuan penelitian merujuk pada teori strategi PR yang dikemukakan oleh Cutlip & Allen H. Center (1982) yang meliputi Fact Finding, Planing, Communication dan Evaluation (Kriyanto Rahmat, 2008;8).

Terdapat lima langkah yang harus diambil oleh Humas dalam revolusi industri yaitu (a) Pada industri 4.0, praktisi humas dituntut dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital, analitik, menulis konten (b) Personalisasi Konten, dimana pengemasan sebuah konten agar mampu memberikan dampak yang besar, praktisi humas harus menjadi kreatif (c) Kreatif dan memahami Global Trend menjadi sebuah tuntutan bagi praktisi humas di era 4.0 untuk dapat mengkombinasikan digital teknologi pada perkembangan teknologi dan fenomena yang sedang terjadi (d), Integritas, praktisi humas harus tetap memiliki tata kelola (Good Governance), transparan dan menjawab kebutuhan seluruh masyarakat, karena dikhawatirkan Humas dapat dengan mudahnya terbawa arus polemik isu dari hoax hingga informasi palsu (e) dan yang terakhir kolaborasi. Praktisi humas tidak bisa berdiri sendiri di era digital, ekspektasi yang dimiliki oleh stakeholders pada peran fungsi strategis PR menjadi lebih berat dari sebelumnya, hal kemudian membutuhkan peranan dari digital content creator, videographer, dan infographic.

Dalam pengelolaannya Instagram @kpusumedang memiliki keterkaitan dengan webistinya, hal ini menjadikan sosial media KPU Sumedang berkesinambungan dengan materi yang ada di Website. Humas KPU Sumedang memerlukan segmentasi konten yang bertujuan untuk membuat keteraturan dalam mengunggah konten tergantung materi informasi yang di posting. Dengan adanya perencanaan konten yang sudah dilakukan oleh Humas KPU Sumedang ini, nantinya langsung dibagikan ke media sosial instagram dan website tersebut agar pengguna dan pengikut dapat menerima informasinya.

informasi terkait KPU Sumedang, yang terlampir diatas, bahwasannya informasi yang dibuat dengan maksimal untuk memberikan sebuah informasi melalui media sosial Instagram lalu mendapatkan informasi dan data lebih lanjut pada website KPU Sumedang. Perbedaan diseminasi informasi di Instagram dan Website berupa pengemasan, bisa dilihat dari gambar diatas, informasi yang di sebarakan melalui instagram terlihat lebih ringkas, mudah dipahami dan juga informatif sedangkan informasi yang disebarakan di website terlihat lebih monoton tetapi untuk informasi yang bersifat dokumen terdapat di dalam website KPU tersebut. Adapun alur kerja yang dibuat Humas KPU Sumedang dalam melakukan Diseminasi Informasi Online yang sedang dilakukan, Humas KPU Sumedang menyusun strategi dengan melihat algoritma konten yang sedang terjadi sehingga informasi yang dibagikan melalui media digital bersifat interaktif dan juga informatif, lalu setelah melakukan riset Humas KPU Sumedang melakukan konsep Aamati, Tiru, Modifikasi (ATM) jadi Humas KPU Setelah melakukan riset terhadap algoritma yang terjadi Humas KPU Menerapkan Konsep ATM sebagai konten yang akan dibagikan kepada masyarakat melalui media digital.

Humas KPU Sumedang melakukan tiga tahapan dalam mengelola strategi Humas dalam pengelolaan diseminasi informasi yang merujuk pada transformasi digital, sesuai dengan model tahap perencanaan yang digambarkan diatas ini, dikaitkan dengan temuan hasil dilapangan Humas KPU Sumedang menentukan beberapa langkah sebelum diseminasi informasi offline menjadi online. Seperti yang dikatakan oleh Kasubag Humas KPU Sumedang di lapangan, bahwa langkah strategi humas dalam Pra Pelaksanaan dengan menganalisis terlebih dahulu baik dalam masalah maupun audiens, lalu dirumuskan tujuan untuk melakukan perubahan diseminasi informasi setelah dirumsukan tujuan Humas KPU mengembangkan pesan yang akan dibagikan melalui website dan media sosial instagram dan merencanakan produksi media lalu pada tahapan pelaksanaan Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi online melalui media sosial dan website setelah dilakukan beberapa tersebut Humas KPU Sumedang melakukan tahapan akhir dalam pasca pelaksanaan yaitu Evaluasi akan diadakan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari diseminasi informasi online yang telah dijalani.



Gambar 1. Alur Kerja Strategi Humas Dalam Pengelolaan Diseminasi Informasi Online

Sesuai dengan yang dilakukan oleh humas dalam strategi pengelolaan diseminasi informasi online dalam alur kerjanya terdapat langkah-langkah strategi humas yang dilakukan dalam bentuk perubahan tersebut sehingga dibuatlah alur kerja Humas KPU Sumedang seperti bagan diatas.

Langkah langkah tersebut dibuat dengan didasari hasil analisis masalah dan audiens yang dilakukan oleh Humas KPU Sumedang.

Jadi, dalam langkah strateginya Humas KPU Sumedang telah mencari tahu dilapangan bagaimana SDM masyarakat di Kabupaten Sumedang sebelum mekakukan diseminasi informasi dalam melakukan perubahan tersebut. Humas KPU Sumedang mengupayakan strategi ini dapat berhasil sehingga informasi dapat dibagikan melalui media digital , Humas KPU Sumedang juga mengupayakan agar SDM di Kabupaten Sumedang dapat meingkat.

Hambatan Humas KPU dalam Melakukan Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi Offline Menjadi Online dalam Menghadapi Transformasi Digital.

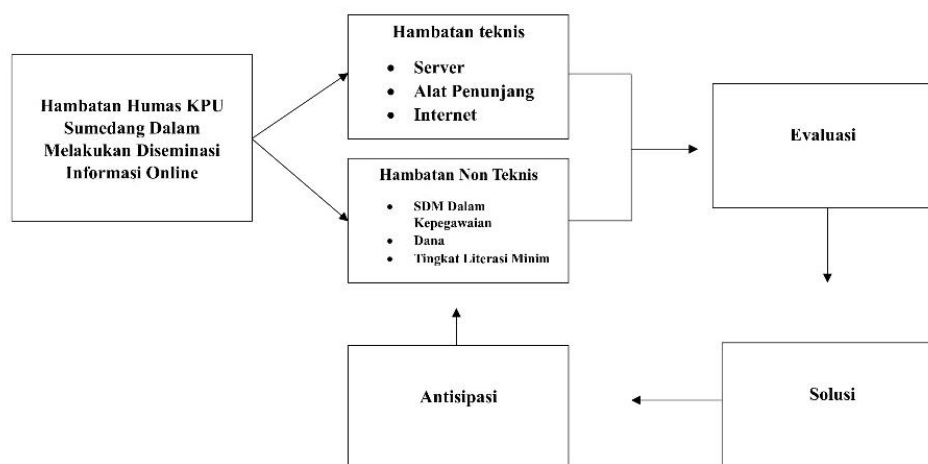
Dalam menjalani suatu perubahan tentunya memiliki hambatan baik dalam Humas KPU Sumedang itu sendiri atau masyarakat, setelah hambatan muncul tentu saja Humas KPU mengevaluasi kerja dan strategi yang Humas KPU Sumedang buat. Dalam usahanya Humas KPU

mendapati hal yang sulit dalam menjalankan perubahan, hal ini serupa yang dikatakan oleh (Effendy, 2003) yang menyatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang melakukan komunikasi dengan sebenar benarnya efektif, banyak hambatan yang dapat merusak kegiatan komunikasi, hal ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan.

Setelah perubahan ini dilakukan Humas KPU Sumedang mendapati hambatan bahwa masih ada daeran di Kabupaten Sumedang yang tidak memiliki alat penunjang untuk mendapatkan informasi yang dibagikan melalui media digital, selain itu SDM masyarakat pun cuku minim jadi masyarakat masih belum mampu dalam menggunakan akses internet atau media digital. Bahkan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Sumedang masih sulit dalam akses internet, jadi bukan hanya alat penunjang seperti hand phone saja tetapi internet pun sulit untuk di akses.

Maka dari itu Humas KPU tetap melakukan sosialisasi offline atau hybrid guna penyebaran informasi tetap merata. Humas KPU Sumedang juga bekerja sama dengan stasiun tv dan radio lokal karena masih ada disebagian wilayah yang mendapatkan informasi melalui tv atau radio. Humas KPU Sumedang melakukan kegiatan sosialisai di acara terbuka yang bertempat di Alun-alun Sumedang. Sehingga masyarakat secara tanpa sengaja mendapatkan informasi dengan sosialisai yang dilakukan di acara terbuka di setiap akhir pekan. besarnya kemungkinan berita hoax yang tersebar juga merupakan suatu hambatan bagi Humas KPU Sumedang dalam menanamkan rasa kepercayaan yang dibangun oleh Humas Kabupaten Sumedang untuk masyarakat. Fitur berita hoax di website dibuat oleh Humas KPU untuk mengimbau atau menjawab bahwa informasi yang beredar itu hoax setelah banyak hoax yang beredar antisipasi-antisipasi pun dibuat oleh Humas KPU agar masyarakat bijaksana dalam mencari atau menyebarkan informasi.

Humas KPU Sumedang memiliki alur dimana hambatan diseminasi informasi online ini terjadi, sesuai dengan hasil penelitian setelah Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi melalui media digital hambatan dibagi menjadi dua yaitu hambatan teknis dan hambatan non teknis. Dalam hambatan teknis terdapat hambatan didalam server yang dimiliki oleh KPU lalu akses internet yang masih minim bahkan internet tidak bida dijangkau di daerah daerah pedalaman, alat penunjang bagi warga pun menjadi suatu hambatan dalam mengakses informasi melalui Internet. Adapun Hambatan non teknis dalam melakukan perubahan diseminasi informasi online ini yaitu yang pertama SDM dalam kepegawaian yang belum memenuhi kriteria untuk menjalankan diseminasi informasi online, lalu dalam pendanaan pun mempengaruhi pelaksanaan diseminasi informasi online ini sendiri baik dari KPU ataupun masyarakat, dan minimnya literasi digital bagi warga juga menjadi suatu hambatan dalam diseminasi informasi ini. Setelah diketahui ternyata fakta dilapangan tidak seluruh masyarakat bisa mengakses informasi dalam internet dilakukanlah evaluasi hasil kerjanya dan juga mengevaluasi interaksi masyarakat dengan bantuan Rt/Rw setempat dalam pendataan warga yang minim dalam melakukan kegiatan yang berbasis digital. Setelah itu Humas KPU Sumedang berupaya mencari solusi agar informasi ini tetap merata penyebarannya dengan cara bekerja sama dengan Stasiun Tv dan Radio lokal sebagai media dalam diseminasi informasi Humas KPU Sumedang juga tidak secara langsung atau otomatis melakukan kerja sama bersama sektor pemerintahan dalam lingkup Rt/Rw hingga Kecamatan masing masing.



Gambar 2. Hambatan dan Penanggulangan Humas KPU Sumedang dalam Melakukan Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi Online

Didalam bagan diatas menunjukkan Humas KPU memiliki alur dimana hambatan diseminasi informasi online ini terjadi, sesuai dengan hasil penelitian yang dimana Humas KPU Sumedang terdapat hambatan teknis dan non teknis lalu Humas KPU Sumedang pun membuat solusi dan antisipasi berdasarkan hasil keluhan masyarakat terhadap diseminasi informasi online tersebut, hal ini hasil dari evaluasi hasil yang telah dilakukan oleh Humas KPU dan menanggapi keluhan masyarakat sehingga diperlukanlah solusi juga antisipasi dalam bentuk merealisasikan besarnya keinginan warga dalam diseminasi informasi tersebut.

Humas KPU Melakukan Metode Hybrid dalam Perubahan Pengelolaan dalam Diseminasi Informasi

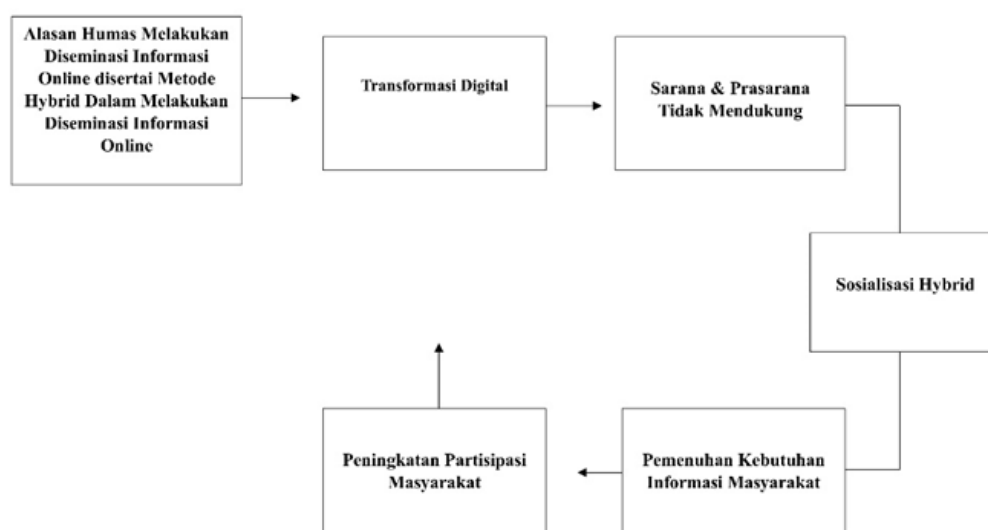
Dalam era transformasi digital, Humas KPU mengikuti perannya dalam perkembangan jaman dan tentunya tuntutan perubahan pengelolaan informasi ini oleh KPU RI yang dimana menjadikan transformasi digital ini dilakukan oleh seluruh KPU. Tujuan dari perubahan ini pun dilakukan untuk masyarakat guna membangun rasa kepercayaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri Pierre Levy dalam (Salomon, 2011:52) mengatakan bahwa new media adalah suatu teori yang didalamnya membahas terkait perkembangan media dari konvensional ke era media digital. Dalam teori new media, terdapat dua pandangan yang dikemukakan oleh Pierre Levy, yaitu Pandangan interaksi sosial, yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy memandang World Wide Web (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis. Pada penjelasan diatas ini, kaitannya dengan hasil yang didapatkan peneliti bahwa, informasi yang dibagikan oleh

Humas KPU Sumedang memiliki sifat informasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat, tidak hanya kabupaten Sumedang tetapi masyarakatpun bisa mengakses informasi dari KPU manapun karena informasi tersebut memiliki sifat fleksibel dan dinamis, yang dimana seluruh masyarakat nantinya menemukan atau membaca terkait informasi yang diberikan oleh Humas KPU ini akan memiliki pengalaman dan pengetahuan baru. Pandangan integrasi sosial, yang merupakan Gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi atau penyebarannya. Tetapi dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Media bukan hanya sebuah instrument informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki

Serupa dengan Humas KPU Sumedang, Bahwa informasi yang diberikan oleh Humas KPU Sumedang di media sosial instagram dapat tercipta sebagai informasi yang informatif, menarik dan juga mempengaruhi. Informasi yang diberikan oleh Humas KPU Sumedang melalui media sosial Instagram, akan menimbulkan suatu interaksi atau komunikasi timbal baik antara penggunanya guna menambah wawasan terkait informasi yang disampaikan.

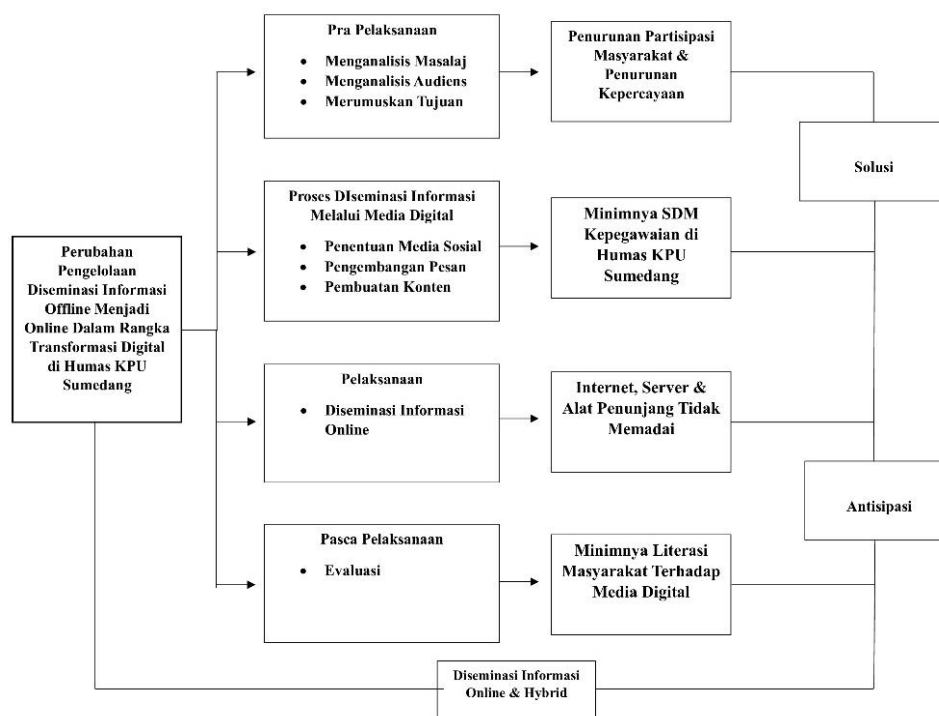
KPU melakukan lomba yang diadakan terkait wawasan Pemilu dan kegiatan olahraga lari bersama masyarakat. Humas KPU Sumedang menggunakan medianya untuk daya tarik dan menjadikan kedekatan kepada masyarakat melalui sebuah konten visual. Namun perubahan terhadap transformasi digital ini beriringan dengan ketidak sinambungan antara SDM dan teknologi yang sudah berjalan, yang pada akhirnya terkhusus pada Humas KPU Kabupaten Sumedang perubahan ini tidak berjalan baik. Masalah ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Humas KPU Sumedang karena perubahan tidak bisa 100% dijalankan, tetapi tujuan KPU dalam merubah pengelolaan diseminasi informasi ini tidak hanya itu tetapi untuk membantu masyarakat agar paham dan mengerti dengan perubahan teknologi yang sudah berkembang. Humas KPU Sumedang melakukan bimbingan teknis melalui sosialisasi dalam upaya membantu masyarakat dalam menggunakan media digital tujuan Humas KPU Sumedang Juga untuk merubah pola pikir, juga sikap masyarakat dan upaya dalam meningkatkan SDM yang rendah. postingan yang dibagikan oleh Instagram

KPU Sumedang, dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih dengan berbagai kalangan sehingga masyarakat ketika dalam saatnya pemilu sudah paham secara aturan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya bagi Humas KPU Sumedang dalam peningkatan SDM sehingga masyarakat perlahan lahan terbiasa dengan informasi yang dilakukan secara digital. Pada bagan ini menjelaskan alasan serta tujuan Humas KPU Sumedang melakukan peerubahan dalam pengelolaan informasi. Transformasi digital bukan semata-mata perihal implementasi teknologi baru, melainkan juga tentang mengubah cara kerja, berpikir, dan berinteraksi dalam lingkungan publik. Sehingga setelah transformasi digital ini terjadi, Humas KPU Sumedang mengharapkan masyarakat merubah pola prilakunya sehingga masyarakat berfikiran terbuka terhadap media digital juga berupaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi itu sendiri yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi masuarakat dengan begitu SDM masyarakatpun meningkat dan mendukung transformasi digital ini.



Gambar 3. Alasan Humas Dalam Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi Online Disertai Diseminasi Informasi Dengan Metode Hybrid

Adapun bagan diatas yang menunjukkan alasan humas dalam perubahan pengelolaan diseminasi informasi online disertai diseminasi informasi dengan metode hybrid yang dimana Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi ini secara online dan juga diseminasi informasi melalui metode hybrid sesuai dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Sumedang yang dimana diseminasi informasi online ini tidak bisa berjalan 100% dengan media digital dikarenakan masyarakat di sebagian wilayah belum mendukung dalam kegiatan diseminasi informasi online.



Gambar 4. Model Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi Online Dalam Transformasi Digital di Humas KPU Sumedang

D. Kesimpulan

Diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Humas KPU Sumedang terdapat beberapa tahapan langkah langkah strategi dalam menjalani perubahan diseminasi informasi online. Pada tahapan pertama yaitu pra pelaksanaan, tahapan ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menganalisis masalah, audiens lalu perumusan tujuan untuk merubah diseminasi informasi offline menjadi online dengan upaya pengoptimalan diseminasi informasi yang dilakukan. Selain itu Humas KPU Sumedang juga menentukan media sosial yang dipilih untuk mengembangkan pesan. Setelah tahapan pra-pelaksanaan dilakukan, tahapan kedua yaitu Pelaksanaan yang dimana Humas KPU Sumedang melakukan sistem pengelolaan informasi yang baru yaitu dengan cara diseminasi informasi melalui media digital. Setelah tahapan pelaksanaan dilakukan Humas KPU Sumedang melakukan tahapan pasca pelaksanaan tahapan ini yaitu tahapan terakhir dari tahapan strategi Humas yang dilakukan oleh Humas Kpu Sumedang yaitu Evaluasi hasil dari perubahan yang dilakukan oleh Humas KPU Sumedang hasil dari evaluasi tersebut akan di kelola kembali untuk mengubah strategi yang sudah dilakukan lalu dikemas kembali menjadi strategi yang baru sesuai dengan hasil evaluasi. Hambatan yang terjadi dalam melakukan perubahan pengelolaan diseminasi informasi online ini terbagi menjadi dua yaitu hambatan Teknis dan hambatan non teknis. Dalam kendala Teknis Server di KPU Sumedang belum memadai, lalu Internet juga menjadi suatu hambatan untuk perubahan diseminasi informasi online ini disamping itu bagi sebagian warga di kabupaten Sumedang masih tidak memiliki Alat Penunjang untuk mendapatkan informasi yang dibagikan melalui media digital. Lalu untuk hambatan non teknis, SDM didalam kepegawaian kurang sehingga Humas KPU Sumedang kewalahan dalam pengerjaan dan literasi masyarakat yang minim sehingga seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang belum siap dalam menghadapi transformasi digital. Perubahan diseminasi informasi yang dilakukan oleh Humas KPU Sumedang dilandasi dengan tuntutan dari KPU RI juga perkembangan transformasi gital, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Sumedang menjadi alasan bagi Humas KPU Sumedang dalam melakukan perubahan diseminasi informasi online. Namun setelah perubahan ini berjalan, bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Sumedang perubahan ini tidak bisa tersebar secara merata karena keterbatasan yang

dimiliki oleh masyarakat yang belum paham akan teknologi digital sehingga Humas KPU Sumedang melakukan sosialisasi dengan metode hybrid, upaya ini dilakukan agar informasi tetap tersebar secara merata dalam kegiatan sosialisasi Hybrid pun Humas KPU mengadakan bimtek sehingga masyarakat teredukasi untuk paham pada transformasi digital tersebut.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan kakak satu-satunya yang luar biasa. Terima kasih kepada Prof. Dr. Atie Rachmiate.Dra.,M.Si. dan juga kepada Ibu Dr. Ani Yuningsih Dra., M.Si. yang telah membantu dalam keberlangsungan pengerjaan skripsi ini. Terimakasih kepada Ibu Dian Widya Putri, S.S., M.I.Kom., yang telah membimbing saya dan juga memberi arahan dalam skripsi ini. Tidak lupa kepada para informan terkait yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis transformasi digital layanan publik pertanahan: Hak tanggungan elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26-49.
- Agustin, E. S., & M. E. Fuady. (2024). Opini Organisatoris Lembaga Kemahasiswaan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Riset Public Relations*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v4i2.5039>
- Albert Verasius Dian Sano, S. (n.d.). Beberapa definisi tentang data, informasi, dan sistem informasi menurut beberapa ahli. Retrieved from <https://binus.ac.id/malang/2020/12/beberapa-definisi-tentang-data-informasi-dan-sistem-informasi-menurut-beberapa-ahli/>
- Budiyono, M. (2016). Media sosial dan komunikasi politik: Media sosial sebagai komunikasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 47-62.
- Daulay, K. U. (n.d.). Strategi humas Komisi Pemilihan Umum dalam. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/13242/1/SKRIPSI%20KHAIRATUN%20UMA%20DAULAY%20%280105172157%29.pdf>
- Haguston, S., & Putri, D. W. (2024). Penggunaan Google Scholar oleh Mahasiswa dalam Mengakses Informasi Edukatif. *Jurnal Riset Public Relations*, 131–136. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v4i2.5476>
- Hess, T., Benlian, A., Matt, C., & Wiesböck, F. (2016). How German media companies defined their digital transformation strategies. *MIS Quarterly Executive*, 15(2), 103–119.
- Ida Fitriana Ambarsari, N. A.-F. (2024). Digitalisasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik transformasi desa digital melalui pengembangan website desa Klatakan. 396-404. Retrieved from <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/4041>
- Maryanti, S., Komariah, N., & Rodiah, S. (2022). Diseminasi informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Banjar sebagai upaya keterbukaan informasi publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 517-533.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PRofesi Humas*, 6(2), 286-310.

Wiryany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242-252.

Zakariah, K. H., Afriani, V., & Zakariah, M. A. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development*.